

IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH

**Raden Bambang Sumarsono, Djum Djum Noor Benty, Bambang Budi Wiyono,
Maisyaroh, Achmad Supriyanto**

Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang 5 Malang 65145
Email: raden.bambang.fip@um.ac.id

Abstract: The purpose of this science, technology, and art (ipteks) implementation is that at the end of the activity, the Principal Principals in Blitar City can realize quality education through the implementation or implementation of School Based Management (SBM) in elementary school (SD). The target of community service activities is the Principal and Primary School Supervisor. The form of activities is community education, which is implemented through seminar and workshop techniques. The training methods used are varied, among others through lectures, questions and answers, discussions, brainstorming, task methods, exercises, sharing experiences, and consolidation. Based on the results of the evaluation, the outline of capacity building activities of school principals in realizing quality education through the implementation or implementation of school-based management in primary schools can be done well. The number of participants who attended 34 principals, from the number of participants who had more than 90% of the Principal is very active in following the seminar and workshop. All the attendees (100%) followed the activity thoroughly from start to finish. Judging from the results, more than 90% of principals and supervisors understand about the material presented by the resource person.

Keywords: school quality, school based management

Abstrak: Tujuan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) ini adalah agar pada akhir kegiatan, para Kepala Sekolah Dasar di Kota Blitar mampu mewujudkan pendidikan bermutu melalui penerapan atau implementasi MBS di SD. Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Kepala Sekolah Dasar dan Pengawas TK/SD. Bentuk kegiatannya adalah pendidikan masyarakat, yang dilaksanakan melalui teknik seminar dan lokakarya. Metode pelatihan yang digunakan secara bervariasi, antara lain melalui ceramah, tanya jawab, diskusi, brainstorming, metode tugas, latihan, sharing experiences, dan pemantapan. Berdasarkan hasil evaluasi, secara garis besar kegiatan peningkatan kapasitas kepala sekolah dalam mewujudkan pendidikan bermutu melalui penerapan atau implementasi manajemen berbasis sekolah di SD dapat terlaksana dengan baik. Jumlah peserta yang hadir 34 orang Kepala Sekolah, dari jumlah peserta yang hadir lebih dari 90% Kepala Sekolah sangat aktif dalam mengikuti kegiatan seminar dan lokakarya ini. Seluruh peserta yang hadir (100%) mengikuti kegiatan secara tuntas dari awal sampai akhir. Ditinjau dari hasilnya, lebih dari 90% Kepala Sekolah dan Pengawas memahami tentang materi yang disampaikan oleh narasumber.

Kata kunci: manajemen berbasis sekolah, mutu sekolah

Proses membangun pendidikan pada hakikatnya adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya sebagai subjek yang bermutu. Membangun

manusia Indonesia seutuhnya pada hakikatnya adalah mengembangkan seluruh potensinya sebagai manusia melalui keseimbangan olah hati,

olah pikir, olah rasa, olahraga yang dilakukan seiring pembangunan peradaban bangsa. Atas dasar itu maka langkah ke depan yang penting dilakukan adalah menentukan perkembangan dan arah pendidikan di tanah air dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 yang secara tegas menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Tekad untuk terus memberikan perhatian besar kepada pembangunan pendidikan mengingat pendidikan mempunyai peranan strategis dalam kehidupan bangsa serta memberikan partisipasi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Hal itu pada gilirannya akan mempengaruhi kesejahteraan umum masyarakat dan ketertiban dunia secara lebih luas. Pendidikan secara tidak langsung juga akan menciptakan masyarakat yang mandiri, demokratis, sejahtera dan bebas dari kemiskinan.

Penyelenggaraan pendidikan dalam era otonomi daerah secara ideal diharapkan akan menunjukkan tingkatan mutu yang lebih baik dibandingkan ketika masih menganut sistem sentralisasi. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa momentum otonomi daerah menyebabkan orientasi penyelenggaraan pendidikan antarwilayah terkesan semakin kehilangan arah oleh karena cara pandang yang dibangun sendiri-sendiri oleh aparatur pendidikan di kabupaten/kota dalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan. Di lain pihak masih tampak kurangnya terbangun komitmen untuk meningkatkan mutu serta konsistensi untuk merancang dan merealisasikan seluruh program yang bermuara kepada pencapaian mutu lulusan pendidikan. Dalam kerangka otonomi daerah maka tanggung jawab memenuhi tuntutan pendidikan yang bermutu sepenuhnya adalah pada pemerintah kabupaten/kota. Kenyataan bahwa adanya berbagai keterbatasan yang dimiliki pemerintah terutama dalam hal pendanaan, maka pemerintah perlu mengembangkan strategi yang komprehensif baik jangka pendek, menengah maupun panjang untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Implementasi otonomi dalam bidang pendidikan ditinjau dari sisi kelembagaan pendidikan mensyaratkan pengelolaan pendidikan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa aspek potensial agar

kelembagaan sekolah mampu mewujudkan serta menampilkan perannya sebagai wadah pengembangan dan pembinaan SDM secara bermutu.

Untuk mewujudkan filosofi pendidikan global di tingkat kabupaten/kota, perlu dikembangkan skema konseptual arah dan orientasi penyelenggaraan pendidikan yang dituangkan ke dalam visi, misi, dan program implementasi di tingkat kabupaten/kota. Sebagai suatu kerangka acuan (*frame of reference*) maka skema ini dapat dijadikan rujukan bersama dalam memobilisasi berbagai sumber potensial yang ada di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, yang diaktualisasikan dalam bentuk program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai model manajemen sekolah yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung warga sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.

Apabila ditelaah di lapangan terkait implementasi program MBS di Kota Blitar belum dilaksanakan secara optimal, hal ini ditandai dengan: (1) ada beberapa sekolah belum menerapkan manajemen sekolah yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan mandiri untuk membangun demokrasi pendidikan; (2) kurangnya partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dan orang tua murid dalam membantu/mendukung pengembangan sekolah, perencanaan kegiatan dan anggaran, dan kontrol serta bantuan teknis untuk sekolah; dan (3) kemampuan sumberdaya manusia, baik kepala sekolah maupun guru-guru masih sangat minim khususnya dalam implementasi program MBS, hanya sebagian kecil saja yang telah mengimplementasikan program MBS. Beberapa hasil penelitian Timan (2015) tentang Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Sekolah di Kota Blitar, menunjukkan: (1) belum optimalnya sekolah dalam memberdayakan partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu sekolah di SD Kota Blitar; dan (2) capaian prestasi akademik dan lulusan SD Kota Blitar belum maksimal, masih terus diupayakan adanya peningkatan. Salah satu unsur dalam program MBS yaitu peranserta masyarakat, untuk itu hasil penelitian tersebut perlu ditindaklanjuti dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya terkait implementasi program MBS.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan agar pada akhir kegiatan para Kepala Sekolah Dasar di Kota Blitar mengerti dan memahami konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan mampu mewujudkan sekolah yang bermutu melalui implementasi MBS. Untuk itu teknik penyampaian dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan lokakarya secara intensif. Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam merealisasi pemecahan masalah, yaitu *pertama*, sosialisasi materi Kebijakan MBS di Indonesia. *Kedua*, sosialisasi materi tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan MBS. *Ketiga*, menyampaikan materi tentang Sekolah Bermutu. *Keempat*, pemantapan Peran Pengawas Sekolah dalam Implementasi MBS di SD. *Kelima*, memberikan latihan kepada para Kepala Sekolah dan Pengawas dalam menganalisis dan mengkaji pelaksanaan MBS di sekolah masing-masing dan di wilayah kepengawasannya. *Keenam*, memantapkan kemampuan Kepala Sekolah dalam menyusun program-program sekolah terkait pencapaian mutu sekolah. Dan *Ketujuh*, melakukan evaluasi hasil lokakarya atau pelatihan tersebut.

Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah para Kepala SD baik negeri maupun swasta dan Pengawas TK/SD di Kota Blitar. Oleh karena wilayah Kota Blitar tidak terlalu besar maka peserta berasal dari seluruh Kepala SD yang ada di Kota Blitar. Melalui teknik pengembangan yang efektif, diharapkan para Kepala SD dapat mewujudkan mutu pendidikan melalui penerapan MBS. Untuk mengetahui keberhasilan program kegiatan, juga dilakukan evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) evaluasi *input*, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk melihat kemampuan peserta, sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan. Melalui evaluasi input, akan diketahui kondisi awal peserta, sebelum ditingkatkan. Teknik evaluasi

yang digunakan adalah tes; (2) evaluasi *proses*, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk melihat tingkat keefektifan proses pengabdian, baik selama mengikuti seminar, maupun workshop. Teknik evaluasi menggunakan observasi dan tanya jawab; (3) evaluasi *output*, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk menelaah tingkat keefektifan hasil pengabdian ditinjau dari peningkatan kemampuan peserta, maupun produk yang dihasilkan, setelah mengikuti proses pengabdian, teknik evaluasi yang digunakan adalah tes dan penilaian hasil tugas; dan (4) evaluasi *impact*, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk menelaah dampak program pelatihan atau lokakarya upaya peningkatan mutu pendidikan melalui implementasi manajemen berbasis sekolah di sekolah dasar Kota Blitar. Teknik evaluasi yang digunakan adalah kuesioner, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL

Kegiatan pengabdian ini dilakukan sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan. Inti kegiatan pengabdian adalah melaksanakan *workshop* secara intensif kepada para kepala sekolah (SD) dan Pengawas TK/SD. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi karakteristik peserta. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan diskusi dengan Dinas Pendidikan Kota Blitar. Melalui kegiatan identifikasi ini, dapat diketahui karakteristik dasar peserta workshop. Hal ini sekaligus merupakan implementasi dari evaluasi input. Melalui kegiatan identifikasi ini dapat dilakukan kegiatan *workshop* secara tepat.

Setelah kegiatan identifikasi selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan inti, yaitu seminar dan lokakarya (*workshop*) tentang upaya peningkatan mutu pendidikan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah di sekolah dasar di Kota Blitar. Untuk itu pelaksanaan seminar dengan model panel, mengingat keterbatasan waktu. Secara garis

Tabel 1 Materi dan Fasilitator

No	Materi	Fasilitator
1	Kebijakan Implementasi MBS di Indonesia	Dr. H. A. Supriyanto, M.Pd., M.Si
2	Pola Pembinaan dan Pengembangan MBS	Dra. Djum Djum Noor Benty, M.Pd
3	Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Implementasi MBS	Dr. R. Bambang Sumarsono, M.Pd
4	Peran Pengawas Sekolah dalam Implementasi MBS	Dr. Hj. Maisyaroh, M.Pd

besar pelaksanaan penyampaian materi seminar dan lokakarya sebagaimana pada Tabel 1.

Pembukaan pelatihan dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar yaitu Bapak Mokhammad Sidik, S.Sos, M.AP didampingi oleh beberapa Kepala UPTD Pendidikan. Sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan, kegiatan penyampaian materi pertama oleh Bapak Dr. H. A. Supriyanto, M.Pd., M.Si yang menyampaikan materi tentang Kebijakan Implementasi MBS di Indonesia. Metode yang digunakan adalah ceramah, yang diselengi dengan tanya jawab dan curah pendapat. Kegiatan penyampaian materi kedua oleh Ibu Dra. Djum Djum Noor Benty, M.Pd yang menyampaikan materi tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan MBS. Metode yang digunakan dalam penyampaian materi, tidak jauh berbeda dengan fasilitator pertama, yaitu dengan ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelas. Kegiatan penyampaian materi ketiga dilanjutkan oleh Bapak Dr. Raden Bambang Sumarsono, S.Pd., M.Pd yang menyampaikan materi tentang Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Implementasi MBS. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelas, dan analisis. Materi dilanjutkan dengan Peran Pengawas Sekolah dalam Implementasi MBS, yang disampaikan oleh Ibu Dr. Hj. Maisyaroh, M.Pd. Metode penyampaian materi ini dengan ceramah, tanya jawab, dan *sharing of experiences*.

Untuk meningkatkan motivasi dan situasi kegiatan pelatihan yang kondusif selama kegiatan berlangsung, dilakukan penyegaran melalui gerak-gerak badan, bermain kuis, dan bernyanyi bersama. Dengan demikian peserta pelatihan merasa lebih mantap dalam mengikuti kegiatan. Pada awal kegiatan para peserta menyampaikan bahwa: (1) mereka baru pertama kali mendapatkan materi tentang MBS, sehingga kurang mengerti tentang Implementasi Program MBS; dan (2) para Kepala Sekolah merasa kesulitan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat atau orang tua/wali murid dalam pendanaan pendidikan oleh karena adanya kebijakan sekolah gratis dari Pemerintah Kota Blitar. Sehingga dapat dikatakan tingkat partisipasi masyarakat/orang tua siswa masih tergolong rendah.

Sesuai dengan rencana, untuk melihat respon peserta terhadap kegiatan pelatihan, dilakukan evaluasi proses. Evaluasi proses dilakukan melalui

pengamatan. Berdasarkan hasil evaluasi proses, dapat digarisbawahi bahwa 100% atau sebanyak 34 orang peserta pelatihan yang hadir terlihat aktif dan penuh perhatian dalam mengikuti kegiatan pelatihan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan dapat berjalan dengan baik. Untuk mengetahui hasil kegiatan pelatihan ini, maka pada akhir kegiatan dilakukan evaluasi *output* terhadap peserta pelatihan. Berdasarkan hasil evaluasi *output*, dapat diketahui peningkatan kemampuan Kepala Sekolah tentang Program MBS, lebih dari 90% Kepala Sekolah memahami tentang kebijakan Program MBS di Indonesia, Pola Pembinaan dan Pengembangan MBS, dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Implementasi MBS, serta pengawas mengetahui peranannya di dalam implementasi MBS. Evaluasi *output* dilakukan melalui pengisian instrumen keberhasilan implementasi MBS

Sebagai tindak lanjut (*sustainability*) program pengabdian ini, diminta para Kepala Sekolah mengimplementasikan hasil pelatihan di sekolah masing-masing, dan bagi para Pengawas TK/SD yang turut serta dalam kegiatan ini diminta untuk memberikan bimbingan ataupun arahan kepada para Kepala Sekolah dalam mengimplementasikan Program MBS. Untuk itu, para fasilitator melakukan evaluasi *outcome* untuk melihat hasil implementasi materi pelatihan di lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian ini berhasil dalam mencapai tujuan. Banyak manfaat yang bisa diperoleh melalui kegiatan ini. Bagi Kepala Sekolah, melalui kegiatan pengabdian ini, akan bisa menambah pengetahuan dan *skill* dalam implementasi MBS. Dengan demikian secara tidak langsung juga akan dapat meningkatkan kapasitas kepala sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Bagi pengawas TK/SD, melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memainkan peranannya untuk mendampingi para Kepala Sekolah dalam implementasi MBS.

Kebermanfaatan lainnya dari kegiatan pelatihan ini juga dirasakan oleh UM. Bagi UM, sebagai lembaga pendidikan tinggi di Malang, melalui LPM dan fakultas, dapat melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, yaitu turut berperan serta dalam mengembangkan mutu pendidikan di lembaga pendidikan sekitarnya. Bagi UPTD

Pendidikan Kecamatan di Kota Blitar, melalui kegiatan pelatihan ini secara langsung dapat membantu memberikan pemahaman serta keterampilan bagi para kepala sekolah dan Pengawas TK/SD di bawah binaannya dalam mewujudkan mutu pendidikan melalui implementasi program MBS. Dengan demikian UPTD Pendidikan Kota Blitar perlu melakukan kegiatan sejenis, untuk memantapkan hasil dari kegiatan ini. Bagi Pengawas TK/SD, melalui kegiatan pelatihan ini memberikan kebermanfaatannya dalam upaya program pembinaan dan pendampingan dalam implementasi MBS. Bagi para Kepala Sekolah, tentunya akan meningkatkan kapasitas manajerial dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, melalui implementasi MBS.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pelatihan, lebih dari 90% Kepala Sekolah dan Pengawas TK/SD memahami tentang kebijakan implementasi MBS di Indonesia, pola pembinaan dan pengembangan MBS, upaya peningkatan mutu pendidikan, dan peran pengawas dalam implementasi program MBS. Hal ini dapat dikatakan bahwa secara umum kondisi kapasitas Kepala Sekolah dan Pengawas TK/SD di Kota Blitar sudah menunjukkan peningkatan secara signifikan. Dan akan berdampak pada terealisasinya implementasi program MBS di SD Kota Blitar. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah dan guru dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penjelasan pasal 51 ayat 1). Berdasarkan anamot Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, MBS didefinisikan sebagai pengelolaan sumberdaya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah, dengan mengikutsertakan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah dalam pengambilan keputusan, untuk mencapai tujuan peningkatan mutu sekolah.

Pengelolaan dimaknai sebagai proses kegiatan berbentuk sistem yang komponennya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengevaluasian. Sumberdaya sekolah meliputi manusia, sarana prasarana, dan dana. Esensi

MBS adalah otonomi sekolah dan pengambilan keputusan partisipatif untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Otonomi sekolah istilah lainnya adalah kewenangan yang lebih mandiri bagi sekolah yang mengandung makna swasembada, swakelola, swakarya, swadana, dan swalayan. MBS bertujuan meningkatkan kemandirian sekolah melalui pemberian kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumberdaya sekolah, dan mendorong keikutsertaan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah dalam pengambilan keputusan untuk mencapai sasaran peningkatan mutu sekolah. Namun demikian apabila ditelisik lebih jauh terhadap kebijakan "Sekolah Gratis" justru akan mematikan semangat partisipasi orang tua terutama dalam pendanaan atau pembiayaan pendidikan. Untuk itu Kepala Sekolah harus mampu mengupayakan peningkatan partisipasi orang tua dalam mewujudkan mutu pendidikan di sekolah. Dan juga peran pengawas perlu terus ditingkatkan lagi terutama berkaitan dengan pendampingan dalam implementasi MBS.

Hasil penelitian Timan (2015) tentang partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah di Kota Blitar, menunjukkan: (1) belum optimalnya sekolah dalam memberdayakan partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu sekolah di SD Kota Blitar; dan (2) capaian prestasi akademik dan lulusan SD Kota Blitar belum maksimal, masih terus diupayakan adanya peningkatan. Dari hasil penelitian tersebut dapat menggambarkan kondisi nyata yang ada di SD Kota Blitar khususnya terkait dengan implementasi MBS. MBS bertujuan meningkatkan kemandirian sekolah melalui pemberian kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumberdaya sekolah, dan mendorong keikutsertaan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah dalam pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan mutu sekolah. Konsep ini membawa konsekuensi bahwa pelaksanaan MBS sudah sepatutnya menerapkan pendekatan bahwa "*ideograpik*" yaitu memperbolehkan adanya keberbagaian cara melaksanakan MBS dan bukan lagi menggunakan pendekatan "*nomotetik*" yang cenderung seragam/konformitas untuk semua sekolah.

MBS sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam desentralisasi pendidikan yang bertujuan memperkuat kehidupan berdemokrasi melalui

desentralisasi kewenangan, sumber daya dan dana ke masyarakat tingkat sekolah. Bersama partisipasi aktif masyarakat dalam bidang pendidikan, MBS akan membantu sekolah dalam merencanakan kegiatan sekolah, kebutuhan belajar siswa, dan membuat keputusan pada masalah-masalah yang langsung berakibat pada pengelolaan sekolah dan belajar siswa. Melalui MBS masyarakat dapat berpartisipasi dengan lebih fleksibel berdasarkan kearifan lokal yang ada. MBS membantu meningkatkan demokratisasi pengelolaan sekolah, transparansi perencanaan, akuntabilitas pelaporan manajemen sekolah dan proses pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan pada umumnya. Akhirnya, MBS membantu sekolah menjadi mandiri.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian hasil kegiatan, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kegiatan seminar dan lokakarya dengan tema upaya peningkatan mutu pendidikan melalui implementasi manajemen berbasis sekolah di sekolah dasar di Kota Blitar dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan metode yang digunakan dalam kegiatan pelatihan adalah metode ceramah, tanya jawab, *sharing of experiences*, diskusi, dan pemberian tugas. Ditinjau dari prosesnya, kegiatan pengabdian untuk meningkatkan upaya peningkatan mutu pendidikan melalui implementasi manajemen berbasis sekolah di sekolah dasar di Kota Blitar ini dapat dilaksanakan secara optimal.

Jumlah khalayak sasaran berjumlah 68 orang, namun oleh karena suatu alasan, maka jumlah peserta yang hadir (mendapat undangan) hanya 34 orang Kepala Sekolah, dari jumlah peserta yang hadir lebih dari 90% Kepala Sekolah sangat aktif dalam mengikuti kegiatan seminar dan lokakarya ini. Seluruh peserta yang hadir, yaitu 34 orang peserta (100%) mengikuti kegiatan secara tuntas dari awal sampai akhir. Ditinjau dari hasilnya, walaupun belum optimal kegiatan pengabdian tentang upaya peningkatan mutu pendidikan melalui implementasi manajemen berbasis sekolah di sekolah dasar di Kota Blitar dengan cukup baik. Lebih dari 90% Kepala Sekolah dan Pengawas

memahami tentang materi yang disampaikan oleh narasumber.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka dapat dikemukakan saran-saran: (1) bagi Kepala Dinas, yaitu dapat tindaklanjuti untuk melaksanakan kegiatan sejenis (seminar dan lokakarya) bagi para Kepala Sekolah sehingga rogram MBS dapat berjalan secara berkelanjutan; (2) bagi Universitas Negeri Malang, yaitu perlu menindaklanjuti kegiatan pengabdian ini pada tahun-tahun mendatang terutama untuk kegiatan pendampingan implementasi program MBS bagi para kepala sekolah. Akan lebih baik, bila ditindaklanjuti dengan materi yang masih diperlukan oleh khalayak sasaran. Untuk itu dukungan dana dari baik Fakultas Ilmu Pendidikan, maupun Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang sangat dibutuhkan dalam merealisasi kebutuhan yang ada; (3) bagi Pengawas, yaitu memberikan pembinaan secara intensif bagi para kepala sekolah di wilayah binaannya dalam implementasi program MBS; dan (4) bagi Kepala Sekolah, yaitu hendaknya hasil pelatihan ini terus diterapkan dan dikembangkan secara optimal di sekolah masing-masing di bawah bimbingan dan arahan baik oleh para Pengawas TK/SD maupun Kepala UPTD Pendidikan Kota Blitar.

DAFTAR RUJUKAN

- Hoy, W. K., & Miskel, C. G. 2005. *Educational Administration: Theory, Research, and Practice*. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Rinehart, G. 1993. *Quality Education: Applying the Philosophy of Dr. W. Edwards Deming to Transform the Educational System*. Milwaukee, WI: ASQC Quality Press.
- Sagala, S. 2009. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sallis, E. 1993. *Total Quality Management In Education*. London: Kogan Page Ltd.
- Tenner, A. R., dan DeToro, I. J. 1992. *Total Quality Management: Three Stepps to Continuous Improvement*. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company.

- Tilaar, H. A. R. 1999. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*. Magelang: Indonesia Tera.
- Timan, A. 2015. *Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar*. Disertasi tidak dipublikasikan. Malang: Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
- Tjaya, T. H. 2004. *Mencari Orientasi Pendidikan Sebuah Perspektif Historis*, (Online), (<http://www.rajaraja.com/news>), diakses 2 Agustus 2013.
- Tjiptono, F., dan Diana, A. 1996. *Total Quality Management*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 2004. Bandung: Citra Umbara.